

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

1. Perkembangan Inflasi

Pada Triwulan IV Tahun 2025, tekanan inflasi di Kabupaten Bintan (mengacu pada IHK Provinsi Kepulauan Riau) menunjukkan peningkatan secara musiman pada akhir tahun.

- Inflasi Year-on-Year (yoy) Desember 2025: $\pm 3,47\%$
- Inflasi Month-to-Month (mtm) Desember 2025: $\pm 1,14\%$
- Inflasi kumulatif tahun kalender masih dalam rentang sasaran nasional ($2,5 \pm 1\%$).

Andil Inflasi per Kelompok Pengeluaran:

1. Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau

→ Penyumbang inflasi terbesar (volatile food)

→ Komoditas utama: cabai merah, cabai rawit, daging ayam ras, telur ayam

ras, beras

→ Dipengaruhi peningkatan permintaan Nataru dan pasokan terbatas.

2. Kelompok Transportasi

→ Andil signifikan akibat kenaikan tarif angkutan laut dan darat

→ Dipengaruhi mobilitas masyarakat dan kenaikan biaya distribusi.

3. Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

→ Dipengaruhi kenaikan harga emas perhiasan dan jasa akhir tahun.

4. Kelompok Perumahan, Air, Listrik dan BBM Rumah Tangga

→ Relatif stabil mengikuti kebijakan nasional.

2. Perkembangan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Penting

3. Pangan Strategis

Pada TW IV 2025 terjadi kenaikan harga pada:

- Cabai merah & cabai rawit (fluktuatif dan sensitif cuaca)
- Daging ayam ras dan telur ayam ras
- Bawang merah

Sementara itu:

Minyak goreng dan gula pasir relatif stabil

- Beras mengalami kenaikan terbatas namun masih terkendali melalui intervensi pasar

1. Barang Penting Lainnya

- LPG 3 kg relatif stabil namun permintaan meningkat
- BBM mengikuti kebijakan pusat
- Bahan bangunan relatif stabil

1. Kelompok Jasa

- Tarif transportasi meningkat akibat musim libur
- Beberapa jasa rumah tangga dan personal care mengalami penyesuaian harga

3. Risiko Inflasi ke Depan (TW I Tahun 2026)

Beberapa risiko yang perlu diantisipasi:

1. Volatilitas Harga Hortikultura akibat faktor cuaca dan ketergantungan pasokan luar daerah.
2. Tingginya biaya logistik wilayah kepulauan yang memicu cost-push inflation.
3. Gangguan distribusi antar pulau pada musim angin utara.
4. Fluktuasi harga energi dan pangan global.
5. Keterbatasan cadangan pangan daerah untuk stabilisasi cepat.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Beberapa permasalahan pengendalian inflasi di Kabupaten Bintan pada Triwulan IV

Tahun 2025 antara lain:

1. Ketergantungan Pasokan dari Luar Daerah

Sebagian besar komoditas pangan strategis seperti beras, cabai, bawang merah, dan daging ayam masih dipasok dari luar wilayah, sehingga rentan terhadap gangguan distribusi dan fluktuasi harga di daerah asal.

2. Tingginya Biaya Logistik Wilayah Kepulauan

Kondisi geografis Kabupaten Bintan sebagai wilayah kepulauan menyebabkan biaya transportasi dan distribusi relatif tinggi, yang berdampak pada pembentukan harga di tingkat konsumen.

3. Fluktuasi Harga Komoditas Hortikultura (Volatile Food)

Harga cabai dan komoditas hortikultura lainnya sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca, musim tanam/panen, serta keterbatasan pasokan, sehingga sulit dikendalikan dalam jangka pendek.

4. Peningkatan Permintaan Musiman (Nataru)

◦

Lonjakan permintaan menjelang Natal dan Tahun Baru menyebabkan tekanan harga pada kelompok pangan dan transportasi.

5. Keterbatasan Cadangan Pangan Daerah
6. Belum optimalnya penguatan cadangan pangan pemerintah daerah membatasi ruang intervensi cepat saat terjadi gejolak harga.
7. Koordinasi dan Pengawasan Distribusi yang Perlu Diperkuat

Masih diperlukan penguatan pengawasan rantai distribusi untuk mencegah praktik penimbunan atau spekulasi harga.

8. Pengaruh Kebijakan Nasional terhadap Harga Energi dan Pangan

Penyesuaian harga energi dan kebijakan pangan nasional turut memengaruhi dinamika harga di daerah.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Bintan pada Triwulan IV Tahun 2025 dilaksanakan melalui sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama perangkat daerah terkait dengan fokus pada stabilisasi pasokan dan harga komoditas strategis, khususnya menjelang periode Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Beberapa kegiatan pada Triwulan IV terkait pengendalian inflasi adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Operasi Pasar dan Pasar Murah

Dilaksanakan pada beberapa kecamatan untuk menjaga keterjangkauan harga komoditas strategis seperti beras, minyak goreng, gula pasir, telur ayam ras, dan daging ayam ras.

1. Pemantauan Harga dan Ketersediaan Pasokan Secara Rutin

Monitoring harga harian di pasar tradisional dan distributor utama guna mendeteksi potensi kenaikan harga lebih awal, khususnya komoditas cabai, bawang merah, beras, dan ayam ras.

1. Penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD)

Koordinasi dengan daerah pemasok untuk menjaga kelancaran distribusi dan memastikan kecukupan pasokan pangan.

1. Stabilisasi Harga Ayam Ras (Program SOP AYAM BINTAN)

Intervensi pada rantai distribusi ayam ras guna menjaga keseimbangan harga di tingkat produsen dan konsumen.

1. Pengawasan Distribusi dan Pencegahan Penimbunan

Bersama instansi terkait melakukan pengawasan terhadap distributor dan agen untuk menghindari praktik spekulasi harga.

1. Optimalisasi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Pemanfaatan cadangan beras pemerintah daerah untuk mengantisipasi gejolak harga dan menjaga stabilitas pasokan.

1. Edukasi dan Publikasi Informasi Harga kepada Masyarakat

Penyampaian informasi harga komoditas melalui media resmi guna menjaga ekspektasi inflasi masyarakat tetap terkendali.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengendalian inflasi selama Triwulan IV Tahun 2025, diperoleh hasil evaluasi sebagai berikut:

1. Stabilitas Harga Relatif Terkendali

Kenaikan harga pada beberapa komoditas strategis seperti cabai, bawang merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras dapat diantisipasi melalui operasi pasar dan pemantauan intensif. Secara umum, inflasi masih berada dalam rentang yang terkendali meskipun terjadi tekanan musiman akhir tahun.

2. Ketersediaan Pasokan Terjaga

Ketersediaan bahan pangan pokok relatif mencukupi selama periode Natal dan Tahun Baru. Koordinasi dengan distributor dan daerah pemasok berjalan baik sehingga tidak terjadi kelangkaan barang.

3. Efektivitas Operasi Pasar dan Pasar Murah

Pelaksanaan pasar murah dan intervensi harga cukup membantu menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat, terutama untuk komoditas beras, minyak goreng, gula pasir, dan telur ayam ras.

4. Penguatan Koordinasi Antar Perangkat Daerah

Rapat koordinasi TPID dan High Level Meeting (HLM) berjalan efektif dalam merumuskan langkah antisipatif menghadapi lonjakan permintaan akhir tahun.

5. Pengawasan Distribusi Berjalan Optimal

Pengawasan terhadap distributor dan rantai pasok dilakukan secara berkala untuk mencegah praktik penimbunan dan spekulasi harga.

Tantangan yang Masih Dihadapi

Meskipun upaya pengendalian berjalan baik, masih terdapat tantangan berupa:

- Fluktuasi harga komoditas hortikultura yang tinggi
- Ketergantungan pasokan dari luar daerah
- Tingginya biaya logistik wilayah kepulauan

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Bintan, maka Pemerintah Kabupaten Bintan merekomendasikan beberapa kebijakan pengendalian inflasi kepada Pemerintah Pusat sebagai berikut:

1. Penguatan Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Nasional
Memperkuat intervensi terhadap komoditas pangan strategis (beras, cabai, bawang merah, daging ayam ras, dan telur) melalui pengelolaan cadangan pangan nasional serta operasi pasar terpadu di daerah kepulauan.
2. Dukungan Subsidi dan Efisiensi Biaya Logistik Wilayah Kepulauan
Memberikan kebijakan afirmatif berupa subsidi transportasi/logistik untuk daerah kepulauan guna menekan disparitas harga dan mengurangi beban biaya distribusi.
3. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)
Mendorong peningkatan alokasi dan fleksibilitas penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah agar intervensi stabilisasi harga dapat dilakukan secara cepat dan efektif.
4. Percepatan dan Perluasan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) Pangan
Memfasilitasi kerja sama langsung antara daerah produsen dan daerah konsumen untuk menjaga kelancaran pasokan dan stabilitas harga.
5. Stabilisasi Harga Energi dan Kebijakan Penyesuaian Harga yang Terukur
Memastikan kebijakan penyesuaian harga BBM, LPG, dan tarif energi lainnya dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap inflasi daerah.
6. Penguatan Sistem Early Warning Inflasi Berbasis Data Nasional
Meningkatkan integrasi data harga pangan dan distribusi secara nasional agar daerah dapat melakukan langkah antisipatif lebih cepat.
7. Dukungan Pengembangan Produksi Pangan Lokal
Meningkatkan dukungan program ketahanan pangan, bantuan sarana produksi pertanian dan peternakan di daerah untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari luar wilayah.